

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Warta Kota |

Khoirudin Ingin Serapan APBD 2024 Capai 90 Persen

Palmerah, Warta Kota

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengingatkan eksekutif untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 se-optimal mungkin.

Hingga akhir tahun ini, diharapkan penyerapan anggaran bisa mencapai 90 persen agar pendapatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS turut terdongkrak

"Penyerapan APBD tahun ini diharapkan bisa mencapai 90 persen. Karena kalau penyerapan kecil, secara otomatis TKD-nya akan mengecil pula," kata Khoirudin usai membuka Rapat Pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2025 di Grand Cempaka Resort & Convention, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11/2024).a

Khoirudin menjelaskan, setelah meneken MoU antara eksekutif dan legislatif soal KUA-PPAS dua pekan lalu di gedung DPRD DKI, maka langsung ditindaklanjuti rangkaian rapat pembahasan APBD 2025 secara intensif. Pada rapat ini, seluruh Komisi ingin membahas secara lebih detail tentang pos-pos anggaran.

"Jadi, semua kegiatan penganggaran harus jelas tujuannya," ucap pria yang juga menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

Pada tahun anggaran 2025, kata Khoirudin, evaluasi yang dilakukan dari dewan bukan berapa persen serapan anggaran, tapi feedback dari penganggaran tersebut seperti apa yang kemudian dinikmati masyarakat. "Intinya, Dewan ingin menguatkan fungsi kontrol agar penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya," tuturnya.

Rapat pembahasan APBD 2025 yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dari Senin (18/11/2024) hingga Rabu (20/11/2024), dihadiri segenap pimpinan dewan dan seluruh komisi yang ada. Adapun dari pihak eksekutif juga pada hadir mulai dari staf hingga pimpinan OPD.

Khoirudin menambahkan pada perencanaan anggaran ini, Pemprov DKI lebih memprioritaskan pada pelayanan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, banjir, dan macet. Apalagi untuk sektor pendidikan, penganggarnya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mana mencapai sekitar 25 persen.

"Adapun tahun sebelumnya sekitar 20 persen. Dengan biaya makin besar ini tentunya kualitas pen-



Penyerapan APBD tahun ini diharapkan bisa mencapai 90 persen. Karena kalau penyerapan kecil, secara otomatis TKD-nya akan mengecil pula.

Khoirudin
Ketua DPRD DKI Jakarta

didikan harus meningkat, karena ada sekolah gratis negeri dan swasta serta program lainnya," ungkap dia.

Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama tiga wakil lainnya, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.

Khoirudin menjelaskan, penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2025, telah menyepakati sejumlah program prioritas, di antaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Kami telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," ujarnya

Dengan penandatanganan MoU, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025. "Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," tutur Khoirudin. (faf)